

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA KOFLIK INTERNAL
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh:

RIA SILSILIYANI

NPM 1716021081



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA KOFLIK
INTERNAL MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi
Lampung)**

Oleh

RIA SILSILYANI

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA KOFLIK INTERNAL
MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera
Provinsi Lampung)**

By

RIA SILSILIYANI

This study aims to analyze the strategies of the Prosperous Justice Party (PKS) in facing the 2024 elections following internal conflicts. The focus of the research is on strengthening institutional capabilities and the political strategies implemented by PKS to achieve success in the elections. Using a descriptive qualitative approach, this study explores the institutionalization process of PKS based on Randall & Svåsand's theory and political strategies according to Peter Schorder. The findings show that PKS employs offensive and defensive strategies to strengthen party identity, enhance decision-making autonomy, and improve public image. These results are expected to provide practical and theoretical contributions to conflict management and political party strategy formulation.

Keywords: *Partai Keadilan Sejahtera, Political Strategy, Political Party Management*

ABSTRAK

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA KOFLIK INTERNAL MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung)

Oleh

RIA SILSILYANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilu 2024 pasca konflik internal. Fokus penelitian terletak pada upaya penguatan kelembagaan dan strategi politik yang diterapkan oleh PKS untuk mencapai keberhasilan dalam pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi proses pelebagaan PKS berdasarkan teori Randall & Svåsand, serta strategi politik menurut Peter Schorder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKS menerapkan strategi ofensif dan defensif untuk memperkuat identitas partai, meningkatkan otonomi keputusan, dan memperbaiki citra publik. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi pengelolaan konflik dan perumusan strategi partai politik.

Kata kunci : Partai Keadilan Sejahtera, Strategi Politik, Manajemen Partai Politik

Judul Skripsi

: Strategi Partai Keadilan Sejahtera
Pasca Konflik Internal Menuju
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi
Pada Dewan Perwakilan Wilayah
Partai Keadilan Sejahtera Provinsi
Lampung)

Nama Mahasiswa

: **Ria Sifsifiyani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716021081

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

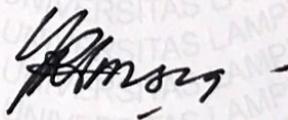
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,



Bendi Juantara, S.IP., M.A.
NIP. 198809232019031011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan,



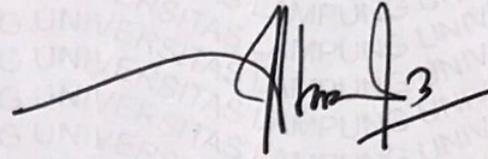
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001

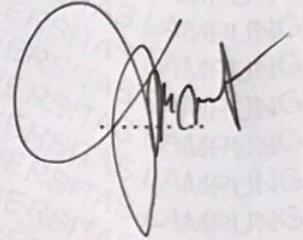
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807198703 2001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah hasil asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ancuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024



Ria Silsiljyari

NPM 1716021081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ria Silsiliyani, anak terakhir dari tujuh bersaudara. Dilahirkan di Serang pada tanggal 2 Maret 1998 dari pasangan Bapak Sugianto (alm) dan Ibu Sarikah. Penulis merupakan anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi dilihat dari bagaimana penulis menempuh pendidikan formal di tiga lokasi yang berbeda yaitu sekolah dasar di SD Negeri 1 Serdang, Kabupaten Serang tahun 2009, sekolah menengah pertama di SMP Futuhiyyah Mranggen, Kabupaten Demak tahun 2012 dan sekolah menengah atas di SMK Satu Nusa 1, Kota Bandar Lampung tahun 2015. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan penulis, aspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi telah dimiliki sedari kecil, sehingga peneliti sayang bersyukur ketika pada tahun 2017 peneliti dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dan secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis juga aktif terlibat dalam kerja-kerja pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi remaja di Bandar Lampung dan menjadi pegawai penuh waktu di salah satu lembaga swadaya tertua di Indonesia sejak tahun 2017. Peneliti telah banyak menggunakan apa yang didapat selama masa perkuliahan dalam proses yang dilakukan di pekerjaan di antaranya proses pembuatan kebijakan dan advokasi kepada pemerintah di organisasi perangkat daerah. Setelah menyelesaikan jenjang sarjana, peneliti juga berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mampu menjadi salah satu penerima beasiswa magister yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Australia melalui Australia Awards Scholarship.

MOTTO

“It's your road, and yours alone.

Others may walk it with you, but no one can walk it for you.”

– Mevlana Rumi

“Walk as if you are kissing the Earth with your feet.”

– Thich Nhat Hanh

Free Palestine until Palestine is free!!!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak Tercinta **Sarikah dan Sugianto (Alm)**

Kakak-kakak Tersayang

Yancornelis, Triono Rizki, Rini Haskiki, Ari Novianti dan Yokiani

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Partai Keadilan Sejahtera Pasca Konflik Internal Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung)”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik- baiknya.

5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Penguji Utama dalam penelitian ini yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Syafarudin, S.Sos., M.A. (alm), selaku Pembimbing Akademik yang telah meninggalkan kita semua menghadap sang maha kuasa. Kesabaran dan pelajaran yang diberikan senantiasa memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
7. Jajaran pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk dapat diampu oleh bapak dan ibu pengajar. Apresiasi yang tinggi karena telah menjadi sosok yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
8. Jajaran staff Jurusan Ilmu Pengetahuan yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah dalam membantu peneliti menyelesaikan proses ini, Bang Puput, Mbak Shela dan Bu Martha. Kesabaran dan kebaikan ini akan saya ingat sebagai buah perjuangan untuk membangun Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi lebih baik.
9. Seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan memberikan data-data terkait laporan pelaksanaan kegiatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kedua orangtua tercinta, Ibu Sarikah, Bapak Sugianto (Alm) yang tidak pernah lupa mendoakan anaknya (peneliti) dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu tersayang.
11. Kakak tercinta, Yancornelis, Triono Rizki, Rini Haskiki, Ari Novianti, Yokiani dan Alan Maulana yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan melanjutkan cit-

citanya. Terkhusus kepada kakakku, Mba Ati, *I can't do this far without you, I owe you one.*

12. Keponakanku, Rengganis Aulia Citra, Kiana Khaira Ma'wa dan Kahfi Khairan Maulana, yang senantiasa menjadi pelipur lara dan sumber semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan ini semua.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang telah bersama membantu peneliti menyelesaikan penulisan ini dengan bantuan dan kehadirannya selama ini. Terkhusus kepada Husna Nabila Zhafira dan Sri Dewi Utami, dan Fitriya Barokah yang sejak awal selalu hadir memberikan dukungannya bagi peneliti.
14. Sahabat semasa peneliti menempuh pendidikan menengah atas sampai dengan hari ini, Cici Wulandira, Febi Anisa dan Marlina, juga Emak/Abah, Mama/Papa yang tidak pernah membiarkan peneliti menjalankan proses ini sendirian. Bantuan dan doa dari mereka telah membantu peneliti menyelesaikan cita-citanya.
15. Sahabat sekaligus rekan kerja yang baik yang selama ini telah memberikan dukungannya tanpa henti, Sugesti Aprilia, Apriska Parancana Putri, Raissa Amalia Rahmadani, Ade Kurnia Saputra, Dede Novrian dan Ardi Firmansyah, juga tidak lupa Mbak Dwi Hafsah Handayani yang senantiasa sabar dalam penantiannya melihat peneliti mendapatkan gelar sarjana.
16. Sahabat sekaligus rekan kerja yang baik, yang selama ini selalu mendorong peneliti untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan semangat yang tak kenal lelah, Virli Andani Harnelis, Umar Nashih Ulwan, Fahrul Herdiandika, Muhamad Ihsanul Kamil, Haliya Zhara Muzakkiya, juga kepada Siti Aisyah dan Adhityas Putri Utami yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menyelesaikan ini di tengah-tengah kesibukan peneliti sebagai pekerja penuh waktu.
17. Kepada sahabat terkasih yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, Devy Dwiantika dan Bangkit Agung Arif Bangsawan, dukungan serta doa

kalian semasa di dunia membantu peneliti menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai kehidupan

- 18.** Terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga bagi diri saya sendiri Ria Silsiliyani, yang meskipun dalam perjalanannya melalui banyak rintangan, selalu memilih untuk bertahan dan menyelesaikan pertarungan sampai akhir dengan perasaan syukur yang penuh.
You're on your own, kid.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

Ria Silsiliyani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Partai Politik.....	10
2.1.1 Pengertian Partai Politik.....	10
2.1.2 Fungsi Partai Politik.....	12
2.2 Tinjauan Strategi Partai Politik	14
2.2.1. Pengertian Strategi	14
2.2.2. Model-Model Strategi.....	15
2.3 Teori Marketing Politik.....	18
2.3.1. Pengertian Marketing Politik	18
2.4 Kerangka Pikir.....	23
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Tipe Penelitian.....	25
3.2. Fokus Penelitian	26

3.3. Informan	27
3.4. Jenis dan Sumber data	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Teknik Pengolahan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	31
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	33
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	34
4.1. Pemilihan Umum di Indonesia	34
4.2. Partai Keadilan Sejahtera	36
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Hasil Penelitian.....	43
VI. PENUTUP	51
6.1. Simpulan.....	51
6.2. Saran.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Catatan Kasus Konflik Internal PKS	3
Tabel 2.2. Informan Penelitian.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
--------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satu masyarakat atau organisasi pun yang bisa lepas dari konflik. Makna konflik secara sederhana diartikan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. terdapat tiga macam konflik politik. *Pertama*, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. *Kedua*, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. *Ketiga*, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik (Rauf, 2001) dalam (Romli, 2018).

Dengan semakin kuatnya peran Parpol dalam kehidupan negara demokrasi, mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik. Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Arianto *et al.*, 2021). Di Indonesia, konflik internal partai politik sudah bukan merupakan hal yang baru, bahkan fenomena ini sudah muncul di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam perjalanan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang berakar dari Sarekat Islam. Menurut Sjamsuddin *et al* (1988) perpecahan dalam parpol bisa disebabkan tiga hal meliputi, perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan kepemimpinan dalam partai. Terdapat beberapa macam konflik

internal dalam tubuh parpol, yaitu :

1. Karena partai tidak memiliki *platform* yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.
2. Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.
3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam perjalanan partai politik ialah kemunculan konflik internal yang muncul dan bahkan menyebabkan kemunculan partai-partai baru diluar partai politik yang sudah ada. Salah satu partai yang mengalami gejolak internal adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dari gerakan dakwah Jamaah Tarbiyah ini cukup mengejutkan ketika konflik internal terjadi di dalam partai yang menampilkan diri sebagai partai dakwah ini. Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal sebagai partai dengan militansi kader serta kesolidan antar kader yang kuat mengejutkan publik ketika konflik internal mereka memanasi hingga berujung dengan lahirnya Partai Gelora Indonesia pada tahun 2019.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki catatan yang baik dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya. Partai dakwah ini mampu menorehkan pencapaian positif selama perjalanannya politiknya, dibalik perkembangan positif yang diperlihatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mereka juga memiliki permasalahan berupa konflik internal yang terjadi di dalam tubuh partai. Akmar (2019) menjelaskan bahwa konflik

internal Partai Keadilan Sejahtera berlangsung sejak tahun 2004 (dapat dilihat pada tabel 1). Bermula dari perbedaan pandangan hingga melahirkan adanya faksi di dalam tubuh partai, yaitu faksi keadilan dan sejahtera. Konflik inilah yang akhirnya memicu munculnya GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) serta munculnya fenomena mundurnya kader-kader PKS.

Tabel 1. Catatan Kasus Konflik Internal PKS

Tahun	Faksi	Latar Belakang	Kecenderungan
2004	Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan	Perbedaan pandangan hidup kader atas sumber daya finansial atau materi	Ideologi
2008-2010	Kelompok Moderat dan Kelompok Ortodoks	Perbedaan pandangan untuk menjadikan partai terbuka bagi non muslim	Ideologi
2016	Faksi Sejahtera dan Keadilan	PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis Matta (pimpinan PKS periode sebelumnya) tidak masuk ke dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS.	Ideologi
2018	Faksi Sejahtera dan Keadilan	Perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong.	Ideologi

Sumber: (Budiatri & Putri, 2018) dalam (Akmar, 2019)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa awal mula konflik dimulai dari GARBI yang merupakan gerakan yang dipimpin oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. Gerakan ini juga memunculkan fenomena mengundurkan diri yang dilakukan kader-kader dari PKS. Diantara kader yang akhirnya keluar dari PKS diantaranya adalah Anis Matta, Mahfudz Siddiq dan Sita Sukanto. GARBI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Deklarasi GARBI sebagai ormas dilakukan diberbagai daerah, pertama kali di Makassar pada bulan September 2018. GARBI yang awalnya mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat akhirnya bertransformasi menjadi sebuah partai politik yaitu Partai Gelora Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019. Diketuai oleh Anis Matta yang merupakan mantan Presiden PKS tahun 2013-2015.

Konflik internal ini tentunya mengganggu peran dari partai politik itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Nurhasim (2013) menggambarkan adanya perbedaan dan konflik internal pada tubuh partai politik memancing anggota untuk meninggalkan dan memilih keluar kemudian membuat partai baru. Konflik internal parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi oleh kuatnya tokoh yang mengambil peran penting sebagai penggerak parpol, sehingga perselisihan internal parpol akan menyebabkan tokoh-tokoh pendiri partai meninggalkan parpol yang dibentuknya semula (Barokah *et al.*, 2022).

Pandangan Harmel & Robertson (1985) kemunculan partai baru terkait dengan peristiwa sejarah tertentu di masyarakat. Mair dan Erlingsson dalam Bolin (2007) melihat interpretasi yang serupa bahwa partai baru merupakan partai yang awalnya bukan sebagai anggota sistem partai yang pernah terkonsolidasi. Secara umum partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. *Pertama*, partai baru muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atau lebih partai yang didirikan. *Kedua*, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. *Ketiga*, partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain.

Salah satu partai baru pada Pemilu 2024 yang terbentuk akibat perpecahan internal ialah Partai Gelora. Partai Gelora mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis atau partai tengah, kelahirannya tidak bisa lepas dari faksionalisasi di salah satu partai Islam yaitu PKS (Argenti, 2021). Partai Gelora didirikan 28 Oktober 2019 dan dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh mantan tokoh muda berpengaruh PKS. Di ketuai oleh Anis Matta. Partai Gelora Indonesia terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, banyak petinggi Partai Gelora merupakan bekas kader yang sudah keluar dari PKS (CNN Indonesia, 2019). Hadirnya Partai Gelora tentu mengejutkan banyak pihak, terlebih budaya organisasi di rumah sebelumnya

terbilang sangat rapih dalam mengelola konflik politik di internal partai (Argenti, 2021). Singkatnya, kehadiran Partai Gelora pada ranah politik dan publik karena adanya konflik yang menjerat PKS. Disintegrasi kedua partai ini berawal mulai dari perbedaan pandangan mengenai orientasi partai politik antara Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Dimana, Anis Matta kurang menyetujui adanya partai politik yang tertutup dan Anis Matta menghendaki PKS sebaiknya menjadi partai yang lebih terbuka agar dapat menyesuaikan diri dengan model demokrasi yang ada di Indonesia (Widyana, 2022).

Partai Gelora memilih jalannya sendiri, memilih ideologi berbeda dengan partai induk, yakni nasionalis sebagai pijakan berpolitik. Pilihan mendirikan partai nasionalis berasas pancasila. Dengan mengusung ideologi yang berbeda, partai ingin memperluas ceruk pemilih, tidak dari satu segmentasi pemilih tertentu, tapi merangkul semua entitas politik di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan, meski mendeklarasikan sebagai partai nasionalis, sepertinya stigma sebagai kelompok Islamis tetap ada, terlebih di media Anis Matta menjelaskan partainya nasionalis jati dirinya Islam, sebuah diksi baru dalam panggung politik nasional, biasanya diksinya partai nasionalis religius (Argenti, 2021).

Kegagalan organisasi mengelola konflik internal yang dialami oleh partai-partai politik, baik partai politik besar maupun partai politik kecil, secara umum bersumber dari pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Partai politik yang seharusnya menjadi institusi utama bagi pembangunan dan pematangan pengembangan demokrasi seringkali mengalami konflik internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di internal masing-masing partai politik. Tidak jarang keputusan politik ditentukan secara sepihak oleh segelintir elite partai politik. Partai politik di Indonesia belum memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara rasional dan demokratis.

Kasus konflik internal dalam tubuh PKS dapat dilihat dari konsep pelembagaan partai politik dari Randall & Svåsand (2002) untuk melihat

proses pelebagaan, Randall membagi dua aspek pelebagaan yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan 4 derajat pelebagaann meliputi: derajat kesisteman (*systemnes*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).

Penyebab pecahnya PKS dan melahirkan parti baru yaitu Gelora disebabkan perbedaan ideologi yang di inginkan masing-masing elit partai yaitu Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Anis Matta menginginkan ideologi pembaharuan, beberapa kader PKS melakukan penolakan karena lebih baik tetap konsisten untuk menjalankan visi dan misi PKS dengan ideologi partai Islam. Akhirnya keputusan sejumlah pengurus PKS mengundurkan diri dan membentuk Partai Gelora. Perdebatan mengenai ideologi partai politik sehingga menyebabkan perpecahan partai menunjukkan rendahnya pelebagaan PKS. Dalam dimensi pelebagaan "*value infusion*" sebagaimana yang diungkapkan oleh Randall & Svåsand (2002) bahwa partai politik menjadi terinfusi (*infuse*) atau tertanam sebuah *value* (nilai) yang dijadikan sebagai referensi dalam setiap pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa partai politik bertindak sesuai dengan ideologinya. Sejalan dengan Budiatri et al (2017) bahwa ideologi partai merupakan penyebab konflik. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Partai politik sendiri hanya akan menjadi kuat sejauh ia mampu melebagaan dukungan massa. Kekokohan partai politik mencerminkan wawasan dukungan dan derajat pelebagaan. Tanpa adanya pelebagaan partai politik, mustahil terbangunnya pelebagaan sistem kepartaian yang kokoh sehingga berdampak kepada pelebagaan demokrasi. Pelebagaan partai politik sebagai upaya pematangan demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan (*check and balances*).

Penelitian ini berfokus pada strategi partai keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai yang menimbulkan adanya partai sempalan yaitu partai Gelora. Penelitian ini ingin mengetahui kelembagaan partai PKS dengan menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Randall & Svåsand (2002) digunakan dalam tulisan ini untuk melihat proses pelebagaan, Randall membagi dua aspek pelebagaan yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan 4 derajat pelebagaann meliputi: derajat kesisteman (*systemnes*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).

Selain menilik konflik internal partai dengan menelaah kelembagaan partai politik, penelitian ini menganalisis strategi apa yang akan dilakukan oleh PKS menuju Pemilu tahun 2024. Dalam memenangkan sebuah pemilu para kandidat dari berbagai partai politik saling bersaing dengan menggunakan berbagai strategi, salah satunya yaitu strategi kampanye politik. Kampanye politik ialah suatu upaya dalam mempengaruhi masyarakat agar memilih pilihan sesuai dengan tujuannya. Dalam kampanye politik, partai politik juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi kampanye pada masa kampanye pemilihan umum (pemilu) seperti twitter, facebook, youtube dan media sosial lainnya. Mengingat bahwa saat ini teknologi sangat berkembang pesat serta banyak masyarakat menggunakan internet dan mempunyai media sosial. Dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial harus direncanakan dan dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas maupun kekuatan partai politik. Penelitian ini akan menganalisis strategi PKS menuju pemilu 2024 pasca konflik internal partai dengan menggunakan strategi partai politik menurut Peter Schorder (2009) meliputi strategi ofensif dan defensif dalam menembus pasar politik.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Penelitian dari Budiatri et al (2017) dengan judul faksi dan konflik internal partai-partai politik di Indonesia era reformasi. Budiatri menjelaskan Ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis merupakan penyebab konflik. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan. Penelitian sejenis dari Barokah (2023) berjudul Strategi Partai Gelora dan Ummat Menuju Pemilu 2024, menjelaskan strategi kedua partai baru sebagai partai sempalan PKS dan PAN, penelitian Barokah (2023) pun membahas perpecahan internal PKS dan menyebabkan munculnya Partai Gelora. Penelitian lainnya dari Gibran (2022) Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Di Pemilu 2019 menjelaskan strategi Ofensif dan Defensif Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Elektabilitas di Pemilu 2019 untuk menguraikan Hambatan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Legislatif tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana pada strategi Partai Keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai yang menimbulkan adanya partai sempalan yaitu partai Gelora akibat salah satu rendahnya pelembagaan partai ditengarai sebagai pemicu konflik internal dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fokus kajian penelitian inilah sebagai bentuk *novelty* penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kelembagaan Partai Keadilan Sejahtera dalam mengelola konflik internal partai?
2. Bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis proses kelembagaan partai keadilan Sejahtera dalam mengelola konflik internal partai
2. Mengetahui dan menganalisis strategi pada strategi partai keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai referensi tambahan dalam ilmu politik mengenai konflik internal dalam partai politik dan strategi partai politik menuju Pemilu 2024 mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi politik lokal dan otonomi daerah sebagai bahan rujukan mengenai konflik internal partai dan strategi politik menuju Pemilu 2024.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2015).

Edmun Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Sedangkan Ware (1995:5) menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan (Ridho, 2013).

Partai politik menurut Giovanni Sartori adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik” (Budiardjo, 2015:404). Menurut Firmanzah (2018:44) “partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern”. Partai politik (Parpol) memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.

Pendapat lainnya mengenai partai politik juga disampaikan oleh Efriza & Indrawan (2019:207) adalah “organisasi yang bertujuan untuk merebut atau

mempertahankan kekuasaan”. Kata organisasi dan kekuasaan akan sangat mendominasi eksistensi dari sebuah parpol. Parpol tidak akan bisa merebut dan mendapatkan kekuasaan jika tidak bersifat kelompok (hanya individu) dan sebuah organisasi bukanlah parpol jika tujuan hidupnya bukan untuk kekuasaan.

Partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2018:67). Secara teoritis, partai politik adalah pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap rekrutmen elite politik, khususnya dalam menyeleksi orang-orang yang dinilai paling sesuai dengan ideologi dan kepentingan partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu (Darmastuti, 2020).

Berdasarkan buku *Good Party Governance* yang ditulis oleh Warjio et al., (2021) partai politik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pikiran yang sama dengan kekuasaan sebagai fokus utamanya. Partai politik adalah asosiasi orang-orang dengan ide ataupun kepercayaan politik yang sama dengan tujuan untuk menangkap alat-alat pemerintah serta mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan membuat anggota mereka terpilih untuk menjadi berkuasa.

Hadirnya partai politik dalam suatu demokrasi modern dapat dipahami sebagai meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah (Efriza, 2019). Pernyataan tersebut, sejalan dengan yang kemukakan oleh Cole, (2013) bahwa:

“Pembentukan partai politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif”.

Selain definisi oleh para ahli, definisi partai politik diatur oleh Undang-Undang, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai partai politik, penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi perkaderan yang bertujuan merebut kekuasaan, berdasarkan visi misi dan atau tujuan melalui pelibatan seluruh kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya. Partai politik akan semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Namun partai politik dibentuk tidak hanya untuk memerintah tetapi untuk menyalurkan keinginan dan merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di tiap negara demokrasi cukup penting, Katz Katz & Crotty (2014) mengungkapkan bahwa fungsi partai politik terbagi atas : *Coordination, Contesting Election, Recruitmen dan Representation*. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik bagi rakyat Indonesia

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russel J Dalton dan Martin P. Wattenberg membagi fungsi partai menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Partai di elektorat

Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai dielektorat yakni menyederhanakan pilihan bagi pemilih, pendidikan warga negara, membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas dan mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

b. Partai sebagai Organisasi

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki empat fungsi yakni rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan, pelatihan elite politik, pengartikulasian kepentingan politik dan agregasi kepentingan politik.

c. Partai di Pemerintahan

Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat tujuh fungsi utama yakni menciptakan mayoritas pemerintahan, pengorganisasian pemerintahan, implementasi tujuan kebijakan, mengorganisasikan ketidaksepakatan dengan oposisi, menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah, kontrol terhadap administrasi pemerintahan dan memperkuat stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, David McKay juga menjelaskan fungsi lain dari partai politik sebagai berikut (Jurdi, 2014:141):

a. Agregasi Kepentingan

Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.

b. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat

Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.

c. *Staffing Government*

Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.

d. Mengkoordinasi Lembaga-lembaga Pemerintah

Fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.

e. Mempromosikan Stabilitas Politik

Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, meminimalisir konflik dengan menyaring informasi-informasi yang memunculkan potensi konflik.

2.2 Tinjauan Strategi Partai Politik

2.2.1. Pengertian Strategi

Strategi sendiri menurut Moertopo (1974) merupakan keseluruhan rencana tentang tindakan dan keputusan yang bersifat intuitif, kesatuan dasar dan tujuan rencana memberikan warna atau ciri terhadap strategi tersebut. Strategi berasal dari pemikiran-pemikiran orang yang memiliki satu tujuan yang secara garis besarnya sama. Susanti et al. (2021) dalam Widyana (2022) menyebutkan ciri strategi perebutan kekuasaan di tingkat desa diantaranya ialah memanfaatkan sumber daya kemampuan pribadi, kekayaan dan jaringan kekerabatan. Ralph M. Goldman (SP. Varma, 2003) mengatakan strategi

merupakan suatu keseluruhan rencana bertindak yang dipakai seorang pemain dalam rangka mencapai suatu hasil atau serangkaian hasil yang diinginkan dalam keadaan yang merugikan. Menurut Salusu (2015) mendefinisikan strategi yaitu :

“Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

Strategi politik menurut Schroder (2009) merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Dalam pemilu strategi politik perlu digunakan untuk memenangkan persaingan politik. Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, calon kandidat harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suara kepadanya (Syahda & Rafni, 2021). Terdapat tiga strategi politik yang harus dilakukan oleh seorang kandidat menurut Firmanzah, (2011) yaitu: strategi penguatan; strategi menanamkan keyakinan; dan strategi pengenalan dan merebut. Ketiga strategi tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik.

2.2.2. Model-Model Strategi

Menurut Peter Schroder (2009) strategi dibedakan menjadi dua model, strategi ofensif dan defensif dalam menembus pasar politik:

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif adalah strategi yang memperluas pasar dan menembus pasar. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan. Strategi ini sangat dibutuhkan, misalnya apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah massa pemilihnya. Dalam hal ini harus ada banyak orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik akan dapat berhasil.

1) Strategi Memperluas Pasar

a. Kampanye Pemilihan umum

Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Oleh sebab itu, harus ada penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan partai lainnya (Syahda & Rafni, 2021). Bagi partai sendiri, persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

- a) Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru
- b) Bersamaan dengan ditampilkannya program baru, profil partai juga akan berubah. Karena itu, profil yang baru harus tetap dapat diterima oleh pemilih lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh hilangnya lama, atau jumlah pemilih
- c) Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu.
- d) Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

b. Implementasi Politik/Kebijakan

Dalam hal ini keuntungan yang dihasilkan politik baru harus lebih diperhatikan. Untuk itu politik harus dijelaskan secara jelas. Dalam hal ini pihak eksekutif sering kali bertindak salah karena keuntungan yang ditawarkan tidak dirumuskan secara jelas sehingga tidak dapat dimengerti warga. Sebelum pelaksanaannya perlu dilakukan hubungan kemasyarakatan yang baik untuk menghindari diskriminasi sewaktu-waktu (Syahda & Rafni, 2021).

Dalam kasus ini, produk baru yang ditawarkan, yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru

tersebut perlu dipropagandakan. Oleh karena itu pertama-tama kebijakan tersebut harus dirumuskan secara jelas. Kebijakan yang belum rampung sama tidak menariknya dengan produk yang belum rampung.

2) Strategi Menembus Pasar

Strategi ini menggali potensi yang telah ada secara optimal. Contohnya adalah pemasaran program-program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, contohnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Jelasnya, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki kelompok target dimana keberhasilan telah diperoleh sebelumnya.

2. Strategi defensif

Muncul apabila partai pemerintahan atau koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai yang ingin mempertahankan mayoritasnya dan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi defensif disebut sebagai strategi mempertahankan pasar. Strategi ini merupakan suatu strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam kasus semacam ini, partai akan memelihara pemilih tetap mereka, dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Dalam hubungannya dengan aliansi, partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap multipikator yang ada serta menawarkan insentif kepada mereka (Syahda & Rafni, 2021).

2.3 Teori Marketing Politik

2.3.1. Pengertian Marketing Politik

Marketing politik sendiri merupakan persilangan dalam cabang ilmu politik dan ilmu pemasaran (marketing). Menurut Butler & Collins, (2001), pemasaran politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan oleh sebuah partai politik, politikus, atau kontestan dalam membangun kepercayaan citra publik. Menurut Haroen (2014) marketing politik adalah penerapan konsep dan metode marketing ke dalam dunia politik. Marketing diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan pasar (market), yang dalam hal ini adalah para pemilih.

Marketing politik bukanlah konsep menjual parpol atau kandidat ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau kontestan dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual, konsep permanen yang dilakukan secara konsisten dan *continue* dalam dalam membangun kepercayaan dan image publik, yang hanya dapat dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa kampanye.

2.3.2. Tahapan Marketing Politik

Terdapat 3 tahapan pemasaran politik, yaitu segmentasi, *targetting* hingga *positioning*(Smith & Hirst, 2001).

1. Segmentasi

Segmentasi pasar merupakan sebuah strategi dalam mengkomunikasikan pesan politik tertentu terhadap konsituen, dan sebuah strategi memetakan pemilih berdasarkan karakteristik tertentu seperti geografi, demografi, psikografi, prilaku, sosial budaya, serta isu-isu yang muncul dalam masyarakat. Pesan politik haruslah disesuaikan dengan pembacaan pasar yang tepat yang bertujuan pada pemetaan kebutuhan masyarakat terhadap domain politik yang akan disampaikan.

2. Targeting

Target diperuntukan kepada audien atau pemilih dengan mendasarkan pada persoalan bagaimana masyarakat yang telah kelompokkan dalam segmensegmen memilih, serta menjangkau masyarakat yang akan ditetapkan sebagai pemilih dan sasaran dari pada marketing politik secara objektif (Al-Barbasy *et al.*, 2015) Targeting merupakan proses strategi setelah segmentasi pasar telah dispesifikasi dan akan langsung ditujukan pada pemilihan target sebagai titik poin penjualan produk.

Lima pola targeting ala Kotler dan Lane yang mampu diterapkan setelah komunikator politik melewati prosesi segmentasi pasar, pola targeting tersebut sebagai berikut:

- 1) *Single Segment Concentration*, yakni parpol atau kandidat memilih satu segmen saja untuk diberi perlakuan. Misalnya parpol atau kandidat hanya berkonsentrasi pada pemilih yang beragama Islam yang diperkirakan jumlahnya sudah cukup banyak untuk memenangkan sebuah pemilihan. Dengan pola ini, parpol atau kandidat lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen, dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar.
- 2) *Selective Specialization*, yakni parpol atau kandidat menseleksi beberapa segmen untuk diberi perlakuan. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan profit politis.
- 3) *Product Specialization*, yakni parpol atau kandidat berkonsentrasi membuat sebuah produk khusus. Melalui cara ini, parpol atau kandidat membangun reputasi yang kuat pada produk yang spesifik.
- 4) *Market Specialization*, yakni parpol atau kandidat berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Parpol atau kandidat memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk

semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut.

- 5) *Full Market Coverage*, yakni parpol atau kandidat berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya parpol dan kandidat yang kuat yang bisa melakukannya (Al-Barbasy *et al.*, 2015)

3. Positioning

Positioning merupakan strategi komunikasi untuk memberikan pandangan kepada pemilih akan keunggulan kandidat dalam bentuk asosiatif. Positioning harus dilakukan dengan analisa terhadap faktor eksternal dan internal organisasi yang dijabarkan dalam bauran produk meliputi tawaran program kerja, profil kandidat, substansi produk politik (Al-Barbasy *et al.*, 2015). Positioning didalam bauran produk politik meliputi tawaran program kerja, profil kandidat, dan segala hal yang berhubungan dengan makna substantive dari produk politik.

Positioning merupakan sebuah strategi merebut alam pikir pemilih. Proses ini adalah bagaimana membentuk kandidat atau parpol menjadi yang paling unggul dalam benak pikir pemilih. Positioning menyangkut masalah pembentukan image yang diselaraskan dari pada keinginan masyarakat. Dalam positioning, atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif pemilih. Dengan hal itu pemilih akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dengan produk lainnya. Sesuatu yang berbeda atau unik dapat membenatu pemilih dalam melakukan diferensiasi atas suatu produk di dalam benak mereka. Proses terakhir dari pada strategi pemasaran ini memegang sebuah peran paling penting dalam upaya memenangkan hati konsituen.

Ada empat buah strategi positioning menurut Newman dan Shet seperti yang dikutip Venus (2004):

- 1) *Reinforcement Strategy* (Strategi penguatan) Strategi ini dapat digunakan oleh sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu. Komunikasi difokuskan kepada orang-orang yang dulu memilih kontestan ini dengan pesan bahwa pilihan dulu sudah tepat, dan tetaplah membuat pilihan yang sama untuk saat ini.
- 2) *Rationilization Strategy* (Strategi Rasionalisasi) Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu, karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai oleh pemilih, akan tetapi kinerjanya tidak sesuai dengan citra tersebut. Strategi ini dilakukan untuk mengubah sikap para pemilih dan harus dilakukan dengan hati-hati.
- 3) *Inducement Strategy* (Strategi Bujukan) Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu, tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.
- 4) *Confrontation Strategy* (Strategi Konfrontasi) Strategi ini dapat diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

2.3.3. Marketing Politik dalam Dimensi 3P

Menurut Adman Nursal, marketing politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, taktis, berdimensi jangka panjang dalam menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, dan orientasi perilaku pemilih, agar menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu secara konsisten. Marketing politik menurut teori Nursal (2004) yaitu Push Marketing, Pull Marketing, dan Pass Marketing:

1. Push marketing

Push marketing adalah proses menyampaikan produk politik secara langsung kepada masyarakat. Produk politik yang dimaksud yaitu calon kandidat itu sendiri dengan segala program yang disampaikan. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan kampanye berupa acara pertemuan akbar, acara pertemuan keagamaan dan kegiatan bakti sosial.

2. Pull marketing,

Pull marketing merupakan penyampaian produk politik dengan menggunakan media massa. Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan marketing politik, memperkenalkan dan mensosialisasikan calon kandidat dapat secara lebih luas. Disamping itu, melalui media massa, calon kandidat dapat menyebarkan informasi mengenai visi, misi dan program mereka kepada calon masyarakat. Strategi Pull marketing biasanya dilakukan dengan menggunakan media cetak (surat kabar) dan media elektronik (televisi dan radio).

3. Pass marketing

Pass marketing merupakan penyampaian produk politik (calon atau partai) melalui orang ketiga yang dianggap sanggup mempengaruhi masyarakat, diantaranya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau tokoh-tokoh lain memiliki pengaruh. Dengan arti lain, pihak-pihak yang mempunyai nilai strategis bagi calon kandidat karena dengan memiliki pengaruh, tokoh tersebut dapat menyampaikan pesan politik kandidat kepada masyarakat atau pemilih. Strategi pemasaran dilakukan melalui pembentukan hubungan politik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Teori marketing politik yang digagas oleh Adman Nursal mendalami mengenai teknik dari kampanye kandidat dalam melakukan pemasaran politik di lapangan. Secara langsung, menggunakan media massa dan menggunakan pihak ketiga (tokoh masyarakat, elite lokal) yang dinilai memiliki pengaruh. Marketing politik juga menjelaskan mengenai teknik kampanye yang dilakukan seorang kandidat ketika pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kandidat tetap akan menggunakan teori Adman Nursal

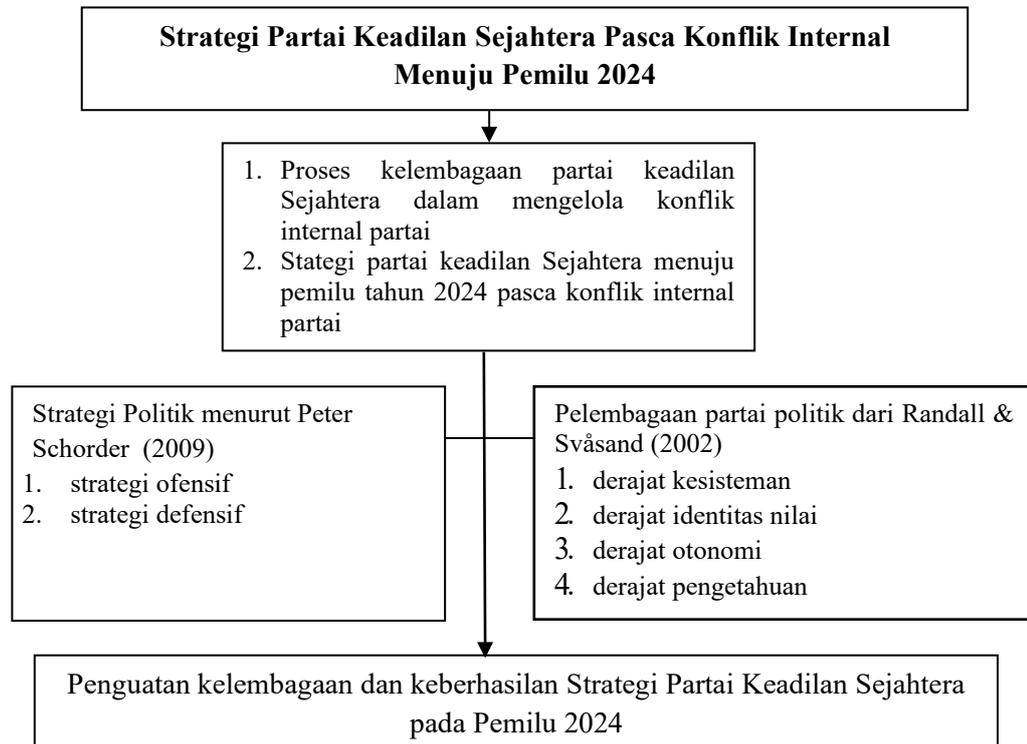
dalam rangka kampanye di lapangan. Teori ini lebih kepada teknik promosi atau kampanye kandidat di level akar rumput (kampanye) (Watoni & Puspitarin, 2022).

2.4 Kerangka Pikir

Pelebagaan partai politik sebagai upaya pematangan demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan (*check and balances*). Penelitian ini berfokus pada strategi partai keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai yang menimbulkan adanya partai sempalan yaitu partai Gelora. Penelitian ini ingin mengetahui kelembagaan partai PKS dengan menggunakan teori pelembagaan partai politik dari Randall & Svåsand (2002) digunakan dalam tulisan ini untuk melihat proses pelembagaan, Randall membagi dua aspek pelembagaan yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan 4 derajat pelembagaannya meliputi: derajat kesisteman (*systemnes*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).

Selain menilik konflik internal partai dengan menelaah kelembagaan partai politik, penelitian ini menganalisis strategi apa yang akan dilakukan oleh PKS menuju Pemilu tahun 2024. Dalam memenangkan sebuah pemilu para kandidat dari berbagai partai politik saling bersaing dengan menggunakan berbagai strategi, salah satunya yaitu strategi kampanye politik. Penelitian ini akan menganalisis strategi PKS menuju pemilu 2024 pasca konflik internal partai dengan menggunakan strategi partai politik menurut Peter Schorder (2009) meliputi strategi ofensif dan defensif dalam menembus pasar politik.

Berikut peneliti berikan gambaran kerangka pikir pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong & Lexy, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017:4):

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024 memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada

dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana penyelesaian konflik internal PKS dan strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024. Dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.

3.2. Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208).

Penelitian ini berfokus pada strategi partai keadilan Sejahtera menuju pemilu tahun 2024 pasca konflik internal partai yang menimbulkan adanya partai sempalan yaitu partai Gelora. Penelitian ini ingin mengetahui kelembagaan partai PKS dengan menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Randall & Svåsand (2002) digunakan dalam tulisan ini untuk melihat proses pelebagaan, Randall membagi dua aspek pelebagaan yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan 4 derajat pelebagaann meliputi: derajat kesisteman (*systemnes*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*). Penelitian ini menganalisis menganalisis strategi PKS menuju pemilu 2024 pasca konflik internal partai dengan menggunakan strategi partai politik menurut Peter Schorder (2009) meliputi strategi ofensif dan defensif dalam menembus pasar politik.

3.3. Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017).

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti di dalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dkk, 2014:9). Penelitian ini memfokuskan informan pada Kader PKS Provinsi Lampung. Berikut adalah informan yang akan di wawancarai :

Tabel 2.2. Informan Penelitian

Informan	Jabatan Instansi	dalam	Keterangan Informasi
1	Pengurus Keadilan Sejahtera	Partai	Penyelesaian konflik intenal PKS
2	Pengurus Keadilan Sejahtera	Partai	Strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024.
3	Pengurus Keadilan Sejahtera	Partai	Strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024
4	Pengurus Keadilan Sejahtera	Partai	Strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024
5	Pengamat Politik		Konflik internal PKS dan Situasi politik menuju Pemilihan Umum tahun 2024

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

3.4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016: 225)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa Undang-undang Pemilu, AD/ART masing-masing partai dan Surat Keputusan (SK) Partai. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan. Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. UU ini terdiri dari 573 pasal
2. AD/ART Partai Keadilan Sejahtera
3. SK Kepengurusan DPW PKS Provinsi Lampung
4. Berita-berita dari media massa online berkaitan dengan konflik internal PKS.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018:38). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Barakso, Sabet dan Schaffner (2014:193) mendefinisikan wawancara adalah

“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil servants. Or any variety of public and/or political actor”

Terkait penelitian ini, wawancara yang dilakukan meliputi wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati, 2017).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2020). Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015:135).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan (Bungin, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian

yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016: 153). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi,2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian

dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & J, 2017:331). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-undang tentang Pemilihan Umum, dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan Strategi Partai Keadilan Sejahtera pasca konflik internal menuju Pemilihan Umum tahun 2024 serta pihak lain seperti pengamat politik

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024–2029 yang akan dilaksanakan pada

Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini akan menjadi pemilihan presiden langsung kelima di Indonesia.

Dikeluarkannya revisi UU Pemilu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021 menyiratkan dihentikan pembahasan revisi. Dengan demikian, wacana normalisasi jadwal pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Pada tahun 2024 mendatang akan digelar Pemilihan Presiden, Anggota DPD, dan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati / Walikota.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Pada saat RDP yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, disimulasikan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 atau 6 Maret 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak disimulasikan digelar pada 13 November 2024 (Wiyoko, 2021).

4.2. Partai Keadilan Sejahtera

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya.

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari

jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

B. Visi & Misi Partai Keadilan Sejahtera

ada Anggaran Dasar PKS yang tertuang dalam bab II pasal 5, visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Selanjutnya misi PKS yang dijelaskan pada pasal 6 adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

C. Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Lampung

Menurut ADART Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah peyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum. Berdasarkan ADART Partai Keadilan Sejahtera, tugas Dewan Pengurus Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu: tugas struktural, tugas konsepsional, dan tugas manajerial. Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Penngurus Wilayah;
- b. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. Membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- d. Atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;
- e. Mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait;
- f. Mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait;

- g. Melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
- h. Merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat
- i. Mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- j. Mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- k. Menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- l. Menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- m. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan pengurus Pusat;
- n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat Melalui Musyawarah Wilayah.

Tugas konseptual Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai dibawahnya yang selanjutnya diajukan ke Dewan Pengurus Pusat;
- b. Mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah;
- c. Menetapkan produk-produk konseptual untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai dibawahnya.

Tugas manajerial Dewan pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
- b. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- d. Melaksanakan koordinasi anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
- e. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
- f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai;
- b. Melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

D. Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Lampung

Selain persyaratan umum untuk menjadi Dewan Pengurus Wilayah terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus terpenuhi, antara lain sebagai berikut: 1) untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta ketua dan Sekertaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya adalah Anggota Ahli dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun; 2) untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli; 3) untuk Jabatan Ketua dan Sekertaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekertaris Badan, Wakil Sekertaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 4) untuk jabatan-jabatan lain sekurang-kurangnya anggota dewasa.

Dalam Kurikulum Kepemimpinan dan Sistem Kaderisasi PKS, ada empat jenjang keanggotaan yang harus dilalui. Ini sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Perubahan Atas UU No.2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 ayat 3b Butir c berbunyi: Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Pertama, Anggota Muda, yakni Anggota pemula yang siap berkontribusi kepada bangsa dan negara Bersama partai. Kedua, Anggota Madya, yakni Anggota Muda yang terikat dengan segala peraturan partai. Ketiga, Anggota Dewasa, yakni Anggota Madya yang menjadi penggerak partai. Keempat, Anggota Ahli, yakni Anggota Dewasa yang menjadi pelopor teladan partai. Kemudian ada lima bidang studi dalam kaderisasi. Kelimanya ini menjadi materi strategis dan penting yang harus diikuti dan dimiliki kader. Pertama, Keagamaan, yakni membentuk kesalihan pribadi yang tercermin dalam sikap anti korupsi, jujur, dan berjuang dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Kebangsaan, yakni mengokohkan jiwa nasionalisme dan mengenal nilai-nilai yang mempersatukan Nusantara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Kemasyarakatan, yakni menguatkan nilai-nilai kemanusiaan agar dapat hidup dengan damai bersama keluarga, tetangga dan masyarakat tanpa memandang warna kulit dan suku bangsa, sebagai keragaman yang membawa rahmat. Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, Kepartaian, yakni mengokohkan komitmen pada partai dan siap berdemokrasi secara jujur, dewasa dan beradab. Memahami peraturan dan konstitusi. Kelima, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, yakni memperkuat bidang keahlian masing-masing agar dapat digunakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa Indonesia.

C. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Lampung

Tabel 4.1. Struktur Anggota DPW PKS Lampung

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Mufti Salim	Ketua DPW PKS Lampung
2.	Agus Kurniawan	Sekretaris Umum DPW PKS Lampung
3.	Joko Mulyono	Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Lampung
4.	Muchlas Ermanto Bastari	Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung
5.	Hendro Sasongko	Ketua Bidang HUMAS DPW PKS Lampung

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Setelah menganalisis data dan menemukan substansi mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilihan Umum tahun 2024. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya perpecahan internal dalam tubuh PKS. Konflik di PKS, tidak terpenuhi tuntutan Anis Mata melakukan pembaharuan pada PKS, hal ini termasuk pendekatan sosiologis.
2. Strategi Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilu 2024 dengan melakukan promosi partai, mempertahankan basis pemilih, lolos ambang batas parlemen 4%, memanfaatkan sumber daya partai dan peluang politik dengan caranya masing-masing.
3. Sebagai partai induk yang memiliki basis pemilih tersendiri, peneliti berasumsi bahwa partai ini akan lolos ambang batas parlemen 4% dan bertahan pada Pemilu 2024 jika partai mampu mengoptimalkan peluang politik dan membuat strategi yang tepat.

6.2. Saran

1. Bagi partai politik, sebaiknya partai politik perlu melakukan pembenahan tata kelola kepartaian maupun pelembagaannya. Kegagalan mengelola konflik partai politik berpotensi merusak soliditas sekaligus menurunkan citra partai, dan menggerus loyalitas pemilih. Jika setiap partai politik di Indonesia mampu menjalankan pelembagaan partai politiknya dengan baik, maka tentunya konflik internal kemungkinannya akan kecil terjadi. Selain itu, jika konflik parpol dapat diselesaikan secara bijaksana dengan penuh.
2. Dalam lingkup penelitian yang terbatas, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menganalisis lebih dalam mengenai partai politik baru, mengingat penelitian ini menganalisis bagaimana pembentukan partai baru, strategi partai politik. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam analisis ini dari masing-masing indikator dan masing-masing partai yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, Z. 2019. Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan Dpp Pks. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 10(1): 89.
- Al-Barbasy, M., Ma'mun & Andriyani, L. 2015. *Pola Marketing Politik Lembaga Survei dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: UMJ Press.
- Anonim, n.d. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Argenti, G. 2021. Partai Baru Antara Gelora, Ummat, Dan Masyumi (Reborn) Oleh : Gili Argenti. (September).
- Arianto, A., Zetra, A. & Fadhilah, R.R. 2021. Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1): 76–84.
- Barakso, Maryan, Daniel, M.S. & Scahffner, B. 2014. *Understanding Political Science Research Methods : The Challenge of Inference*. New York: Routledge.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A. & Hertanto, H. 2022. Disrupsi Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1): 1–13.
- Bolin, N. 2007. *New Party Entrance - Analyzing the Impact of Political Institutions*. Umea: Department of Political Science, Umea University.
- Budiardjo, M. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Budiatri, A.P., Haris, S., Lili Romli, S.N., Nurhasim, M., Darmawan, D. & Hanafi, R.I. 2017. Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2).
- Budiatri & Putri, A. 2018. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Bungin, B. 2015. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Butler, P. & Collins, N. 2001. Payment on Delivery : Recognizing Constituency Service As Political Marketing. *European Journal of Marketing*.
- CNN Indonesia 2019. *Anis Matta Akui Gelora Lahir karena Konflik Internal PKS*.
- Cole, A. 2013. *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning. Jakarta: Kencana.
- Darmastuti, A. 2020. *Partai Politik, Pemilihan Umum dan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Quantum.
- Efriza 2019. Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik (The Existence of The Political Parties in Public Perception). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1): 17-38.
- Efriza & Indrawan, J. 2019. *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Firmanzah 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah 2018. *Mengelola Partai Politik ; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad, Anis & Nugroho, K.S. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harmel, R. & Robertson, J.D. 1985. Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. *International Political Science Review*, 6(4).
- Haroen, D. 2014. *Personal Branding: Kunci Kesuksesan Anda Berkiprah di Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmawati, F. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Katz, R.S. & Crotty, W. 2014. *Hand Book Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Manzilati 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Miles., Mathew, B.A. & Huberman, M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moertopo, A. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Centre for Strategic and

- International Studies. Modern State.* London: Methuen.
- Moleong & J, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong & Lexy 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong & Lexy 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. 2016. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurhasim, M. 2013. Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10.
- Nursal, A. 2004. *Political Marketing: Strategi Menenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPD, DPRD.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Randall, V. & Svåsand, L. 2002. Party Institutionalization in New Democracies. *Jurnal Party Politics*, 8(1): 5–29.
- Rauf, M. 2001. *Konsensus Politik dan Konflik Politik.* Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Ridho, A.-H. 2013. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia.* Jakarta: Graha Ilmu.
- Romli, L. 2018. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8(2): 95–118.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.* Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Satori, D. & Komariah, A. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Schroder, P. 2009. *Strategi Politik.* Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.
- Sjamsuddin, N., Hamid, Z. & Pribadi, T. 1988. *Sistem Politik Indonesia.* Jakarta: Karunika (Universitas Terbuka).
- Smith, G. & Hirst, A. 2001. Strategic Political Segmentation - a New Approach For

- a New Era of Political Marketing. *European Journal of Marketing*, 35(9).
- Sudaryono 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.
- Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, M.H., Setiajid & Anandha 2021. The Dynamics of Local Democracy on Simultaneous Election in Semarang District. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*. Atlantis Press, hal.208–212.
- Syahda, P.H. & Rafni, A. 2021. Strategi Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1): 66–72.
- Venus, A. 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Warjio, Othman, M.F. & Ladiqi, S. 2021. *Good Party Governance. Praktik Partai Politik di Malaysia dan Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Medan: Gerhana Media Kreasi.
- Watoni, S. & Puspitarin, R.C. 2022. Strategi Partai Politik Baru : Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1): 4297–4306.
- Widyana, M.R. 2022. Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1): 125–168.